CASCADING ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 2017 - 2022

No	TUJUAN RB DI DAERAH	SASARAN DAERAH RB	INDIKATOR	FORMULA	TARGET 2022	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	PD UTAMA	PD PENDUKUNG	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET 2022	TAHAPAN						PROGRAM	RENCANA AKSI
														2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Performance based bereaucracy (Birokrasi yang berkinerja	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	nilai opini BPK atas laporan keuangan yang akuntabel	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi jilid II pada 8 area perubahan yaitu :															
			Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	A	1.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Managemen Perubahan	meningkatkan secara berkelanjutan Birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi	Bagian Organisasi	semua Perangkat Daerah	komitmen dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks J PT, Administrator dan pengawas yang dapat berperan sebagai agen perubahan(Role Model)	SURVEY RB	3.75	3.50	3.55	3.60	3.65	3.70	3.75	Program Managemen Perubahan	Rencana aksi area managemen perubahan
			Tingkat kapabilitas APIP	Indeks kapabilitas APIP	3																
			Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Indeks Maturitas SPIP	3.4	2.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi area Penataan dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan	meningkatkan secara berkelanjutan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Bagian Hukum	semua Perangkat Daerah	Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah meningkat	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	Produk hukum yang diharmonisasi / produk hukum yang ditetapkan x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rencana Aksi Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan
			Penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	jumlah lelang dan e-purchasing / total pengadaan x 100%	60%	3.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi area Penataan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	3.meningkatkan secara berkelanjutan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi melalui SAKIP	Bagian Organisasi, Inspektorat, Bappeda		kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Indeks Perencanaan Pembangunan	80%capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah	92	91	91.2	91.4	91.6	91.8	92	Program Penguatan akuntabilitas kinerja	Rencana Aksi Penguatan akuntabilitas kinerja
										akuntabilitas kinerja perangkat daerah meningkat	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat	jumlah PD yang mendapat nilai BB /jumlah PD	90%	65%	70%	75%	80%	85%	90%		
		Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	72	4.Pelaksanaan Reformasi birokrasi area Penataan dan Penguatan Pengawasan	meningkatkan secara berkelanjutan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur, bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan fisik dan bidang sosial ekonomi budaya	Inspektorat		Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	jumlah rekomendasi yang telah di tindaklanjuti dibagi jumlah semua rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100%	91	80	83	85	87	89	91	Program Penataan dan Penguatan Pengawasan	Rencana Aksi Penataandan Penguatan Pengawasan
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	hasil survey kepuasan layanan eksternal dan Internal	81	5.Pelaksanaan Reformasi birokrasi area Penataan dan Penguatan Organisasi	Mengoptimalkan secara berkelanjutan organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Bagian Organisasi		kelembagaan pemerintah daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan bersinergi antar instansi	persentase kelembagaan yang tepat fungsi	(jumlah kebijakan pelayanan publik & ketatalaksanaan yg dihasilkan/ jumlah kebijakan pelayanan publik & ketatalaksanaan yang direncanakan x 100%) +(jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya dibagi jumlah perangkat daerah x 100%) / 2	100%	60%	70%	80%	90%	95%	100%	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Rencana Aksi Penataandan Penguatan Organisasi
						6.Pelaksanaan Reformasi birokrasi area Penataan dan Managemen Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan secara berkelanjutan pengembangan karir aparatur sipil negara	Bagian Organisasi dan BKPP	Dinas Kominfo dan Persandian	kualitas aparatur sipil negara meningkat	Indeks kualitas aparatur sipil negara	50% persentase pemenuhan penataan ASN+20% persentase pelayanan administrasi kepegawaian + 30% persentase kelulusan diklat	84.50	79.70	80.70	81.70	82.70	83.70	84.50	Program Penataan dan Managemen Sumber Daya Aparatur	Rencana Aksi Penataandan Managemen Sumber Daya Aparatur
							Meningkatkan secara berkelanjutan pelayanan administrasi														
							Meningkatkan secara berkelanjutan kompetensi aparatur sipil negara														
										kualitas profesionalitas kompetensi ASN Meningkat	persentase profesionalitas kompetensi ASN	persentase kesesuaian info jabatan dengan jumlah jabatan yang ada	100%	10%	30%	50%	70%	90%	100%		
						7. Pelaksanaan Reformasi birokrasi area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	meningkatkan secara berkelanjutan pelayanan prima sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat	Bagian Organisasi, PD Pelayanan , Dinas Kominfo dan Persandian		Penerapan Standar Pelayanan pada Perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik meningkat	persentase jumlah perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik yang telah menerapkan standar pelayanan	jumlah perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik yang sudah memiliki standar pelayanan/ jumlah perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik	100%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
							Meningkatkan pengelolaan informasi dan statistik			Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	20% Pemanfaatan data + 20%tindak lanjut aduan +60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	82.48	50.76	57.26	63.66	70.06	76.46	82.48		
							Meningkatkan tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam														
							Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik														
						8. Pelaksanaan Reformasi birokrasi area Penataan Tatalaksana	meningkatkan secara berkelanjutan Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo dan persandian		Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government	Presentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SOP	jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SOP /jumlah perangkat daerah	100%	60%	75%	85%	90%	95%	100%	Program Penataan Tatalaksana	Rencana Aksi Penataan Tatalaksana
											Presentase perangkat Daerah yang telah menerapkan proses bisnis	jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan proses bisnis level L0,L1, L2/jumlah perangkat	80%	30%	40%	50%	60%	70%	80%		
											Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	(Jumlah aplikasi yang dibangun/ Jumlah rencana aplikasi) x 100%	86.62%	57.32%	63.69%	69.43%	75.16%	80.89%	86.62%		